



DHARMA PRAJA

JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN

Volume 4 Nomor 1, Juni 2011

ISSN-1979-8857

- 1 STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN APARATUR
PEMERINTAH VERSUS REFORMASI BIROKRASI
Erlana Hasan & Eva Eviany
- 12 MENUMBUHKAN KESADARAN
TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
Dahyar Daraba
- 17 OPTIMALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Suryadi
- 29 KOMUNIKASI PERSUASIF NINIK MAMAK DAN
PEMBENTUKAN ORIENTASI POLITIK GENERASI MUDA
Ondo Riyani
- 40 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI BIDANG POLITIK PEMERINTAHAN
M. Nawawi
- 46 KEDUDUKAN DAN PERANAN KEPALA DAERAH SERTA
GAIRAH UNTUK MENGEJARNYA
Yamin M. Saleh
- 54 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN SUMEDANG
Jojo Juhaeni



FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN

JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

Pembina
Rektor IPDN

Penasehat
Wakil Rektor IPDN

Penanggung jawab
Dekan Fakultas Politik Pemerintahan

Pemimpin Redaksi
Pembantu Dekan II Bidang Administrasi

Wakil Pemimpin Redaksi
Burhanudin Dalil
H.R. Tomtom Utama GS

Sekretaris Redaksi
Eva Eviany
Heru Romansyah

Mitra Bestari
I. Nyoman Sumaryadi
Sadu Wasistiono
Ngadisih
Erliana Hasan
Dedy Riandono

Tim Redaksi
Sidharto
Bambang Supriyadi
M. Irwan Taher
Ella Wargadinata
Wangsih
Etin Indrayani

Staf Redaksi
Erna Nurhayati
Dedhy Guntoro
Agus Tahyan
Endang Sanuji
Eni Sukaesih

Seksi Distribusi
Anwar Rosshad
Rian Sulistyowati
Maman
Yaya Sudiran
Entin Maryatini

Bendahara
Mulyana
Hagia
Ismail

Redaksi Dharma Praja
Kampus IPDN
Jl. Raya Jatinangor Km. 20
Sumedang, Jawa Barat
Telepon : 022 - 7798252
Faksimili : 022 - 7798256
Email : JurnalPolpemDP@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Dharma Praja adalah jurnal ilmiah politik pemerintahan pada Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini merupakan embrio telaahan komprehensif keilmuan yang berada dalam naungan lingkup politik pemerintahan, kebijakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut dibutuhkan banyak sumbangan pemikiran berupa kajian, studi, penelitian dalam bidangnya.

Dharma Praja Nomor 1 Volume 4 Tahun 2011 memuat tujuh tulisan berupa artikel yang telah tersaring berdasarkan standar penilaian jurnal ilmiah secara nasional oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dalam hal ini Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Dekan Fakultas Politik Pemerintahan sebagai Penanggung jawab mewakili redaksi mengundang sumbangan artikel ke berbagai pihak yang memiliki "concern" terhadap kegiatan penelitian di bidang politik pemerintahan, kebijakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta masukan untuk dapat mengetahui kebutuhan tulisan yang diperlukan oleh pembaca, sehingga akan semakin menambah wawasan dan informasi bagi para ilmuwan, praktisi dan pecinta kajian-kajian politik pemerintahan.

Salam

Dekan Fakultas Politik Pemerintahan
Selaku Penanggung jawab

JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

DAFTAR ISI

Strategi Kebijakan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Versus Reformasi Birokrasi Erliana Hasan dan Eva Eviany.....	1
Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang Baik Dahyar Daraba.....	12
Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Suryadi.....	17
Komunikasi persuasif Ninik Mamak dan Pembentukan Orientasi Politik Generasi Muda Ondo Riyani.....	29
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Politik Pemerintahan M. Nawawi.....	40
Kedudukan dan Peranan Kepala Daerah Serta Gairah Untuk Mengejanya Yamin M. Salch.....	46
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Jojo Juhaeni.....	54

MENUMBUHKAN KESADARAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Oleh : Dahyar Daraba

ABSTRACT

Every country must have a government system that runs the governance to realize a country that its people prosper. There are many approaches in the apparatus to synchronize to realize good governance, through religious approach also turns to the adoption of the values that are part of the Asmaul Husna (Allah's names) contained in the Al-Qur'an. Therefore, to foster good governance needed a balance between; Intellectual Intelligence, Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence

Keywords: Good Governance, Religious Approach, Intellectual Intelligence, Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence.

PENDAHULUAN

Pemerintah dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Dalam perkembangannya, pemerintah telah mengalami transformasi paradigma yang kesemuanya dimaksudkan untuk membangun peradaban suatu bangsa.

Transformasi paradigma pemerintahan meliputi beberapa aspek antara lain; perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), perubahan paradigma dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, dan perubahan paradigma sistem pemerintahan dari yang sentralisasi ke desentralisasi pengelolaan pemerintahan. Perkembangan paradigma pemerintahan memasuki paradigma tata pemerintahan yang baik.

Untuk dapat memahami dari berbagai dimensi, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi tentang tata pemerintahan yang baik.

GOVERNMENT DAN GOVERNANCE

Secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai "pemerintah" yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat atau lebih pada kata benda.

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan lebih pada kata sifat (perilakunya). *UN Commission on Human Settlements* (1996) menjelaskan bahwa *governance* adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga baik pemerintahan maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka.

Untuk menumbuhkan kesadaran tata pemerintahan yang baik, ada 10 (sepuluh) prinsip yang harus dilaksanakan. Kesepuluh prinsip tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari 99 Asmaul Husna (nama-nama Allah) yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Visionary / Al Baari' (Wawasan ke Depan)
2. Openness and Transparency / Al Fattah (Keterbukaan dan Transparansi)
3. Participation / Al Mujiib (Partisipasi Masyarakat)
4. Accountability / Al Wakil (Tanggung Gugat)
5. Rule of Law / Al Muqsih (Supremasi Hukum)
6. Democracy / Al Ahad (Demokrasi)
7. Professionalism and Competency / AL Qadir (Profesionalisme Dan Kompetensi)
8. Responsiveness / AL Mushshiy (daya tanggap)
9. Efficiency and Effectiveness / AL Hakam (Efisiensi Dan Efektivitas)
10. Decentralization / AL Waarits (Desentralisasi)

1. Visionary / Al Baari' (Wawasan ke Depan)

Visi merupakan gambaran masa depan yang ideal yang menjadi dasar/arah/pondasi dalam proses perencanaan. karena itu, visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai atau direalisasikan.

Ada dua kata kunci di atas, yaitu kondisi ideal dan dapat direalisasikan. Kondisi ideal, sekalipun hal tersebut bersifat jauh kedepan, namun dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang akurat, maka hal tersebut dimungkinkan dapat dicapai (realistis) oleh organisasi yang menetapkan visi tersebut.

Sedangkan misi merupakan penjabaran dari visi, artinya langkah-langkah utama untuk mencapai visi tersebut. Misi menetapkan komponen-komponen dasar bagi strategi organisasi. Misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasional organisasi agar dapat terus eksis.

2. Openness and transparency / Al Fattah (Keterbukaan & Transparansi)

Keterbukaan (*openness*) adalah tersedianya data/informasi bagi masyarakat yang dapat diakses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan dapat pula merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik.

Transparansi (*transparency*) adalah terbukanya proses perumusan kebijakan publik bagi masyarakat (terbuka bagi partisipasi masyarakat).

Semua urusan pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik baik yang berkenaan

dengan pelayanan publik maupun pembangunan harus diketahui publik. Masyarakat hendaknya mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah dan DPRD.

3. Participation / Al Mujiib (Partisipasi Masyarakat)

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembagian. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam bentuk partisipasi yaitu: (1) partisipasi masyarakat muncul karena ketidakmampuan pemerintah; atau (2) partisipasi masyarakat murni swadaya masyarakat karena mereka butuh sesuatu.

Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintah dapat mengenal lebih dekat siapa masyarakat dan warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang sarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya. Kehadiran, keikutsertaan warga masyarakat dalam forum pertemuan publik, dan keaktifan mereka dalam menyumbangkan pikiran dan saran-saran menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga menjadi urusan mereka, dan bukan semata urusan birokrat sebagaimana terjadi selama ini.

4. Accountability / Al Wakil (Tanggung Gugat)

Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Pada dasarnya setiap pengambilan kebijakan publik akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu,

penyusun kebijakan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada publik. Akuntabilitas merupakan pandangan yang didasarkan pada kejujuran (*fairness*) semua komponen birokrasi yang seharusnya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mendapat kesempatan dalam proses pengambilan keputusan (dituangkan dalam Undang-Undang) lebih aktif, lebih tersistem. Semua kebijakan akan dilaksanakan secara tersistem.

Akuntabilitas sektor publik terkait erat dengan kinerja sektor publik dengan fokus tidak hanya pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetapi juga lebih pada bagaimana mencapai *outcomes* dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa "*Accountability is not just about the right thing but doing it well*".

Dengan penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, diharapkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah/institusi/unit kerja tidak lagi sekedar laporan kesan-kesan dan pesan-pesan, tetapi menjadi laporan pertanggungjawaban kinerja selama yang bersangkutan menjabat. Hal ini sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

5. Rule of Law/AI Muqsith (Supremasi Hukum)

Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi publik.

Dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi pelanggaran hukum, seperti yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalagunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelanggaran HAM. Dalam hal ini, siapa saja yang melanggarnya harus diproses dan ditindak secara hukum atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Democracy/AI Ahad (Demokrasi)

Demokrasi berasal dari bahasa latin (Yunani), "*demokratia*". "*Demos*" berarti rakyat dan

"*kratos*" berarti pemerintahan. Dengan demikian demokrasi dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat.

terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dimaksud adalah adanya tiga lembaga politik utama yang terpisah, sebagaimana diperkenalkan oleh Montesquieu yang terkenal dengan *trias politica*, yaitu *eksekutif*, *judikatif* dan *legislatif* atau dengan kata lain, parlemen, pemerintah atau otoritas hukum. Selain adanya perangkat keras dalam prasyarat dasar politik demokratis, dukungan lain yang tak kalah pentingnya adalah apa yang disebut perangkat lunak. Perangkat lunak dimaksud dalam hal ini juga menjadi prasyarat dasar politik demokratis. Perangkat lunak tersebut meliputi: pemilu; akuntabilitas; adanya hak-hak dasar rakyat seperti berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat; adanya kesamaan di depan hukum; kompetensi; adanya keterbukaan, dan integrasi.

7. Professionalism and Competency/AI Qadir (profesionalisme dan kompetensi)

Di dalam pemberian pelayanan publik dan pembangunan daerah dibutuhkan aparat pemerintah yang memiliki kualifikasi kemampuan tertentu, dengan profesionalisme yang sesuai. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat, dengan memperhatikan antara tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi kemampuan dan profesionalisme. Tingkat kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintah yang ada perlu selalu dinilai kembali, dan berdasarkan penilaian tersebut dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui pendidikan, training, workshop, magang dan sebagainya. Tanpa diterapkannya prinsip profesionalisme dan kompetensi akan menyebabkan pemborosan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8. Responsiveness/AI Muhshiy (Daya Tanggap)

Realitas kehidupan yang sangat dinamis, membutuhkan layanan yang serba cepat. Dinamika tersebut terkadang muncul dengan tiba-tiba, seperti krisis ekonomi dan bencana alam sehingga membutuhkan aparat yang responsif. Di sisi lain, kemajuan status sosial ekonomi masyarakat memunculkan harapan-harapan baru. Oleh sebab itu diperlukan aparat yang memiliki sensitivitas terhadap aspirasi publik dan memiliki kemampuan dalam menyediakan pelayanan secara cepat, tepat, dan tanggap.

Untuk mengetahui harapan (ekspektasi) yang berkembang dalam masyarakat, aparat memprakarsai terwujudnya jejaring aspirasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat. Penyediaan layanan tersebut dilengkapi dengan tahapan tindak lanjutnya sehingga dapat langsung dilakukan pemecahan masalahnya. Respon aparat tersebut dapat berwujud kebijakan, program, proyek, dan kegiatan.

9. Efficiency and Effectiveness/AI Hakam (Efisiensi Dan Efektivitas)

Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber dana lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.

Agar dapat meningkatkan kinerja tata pemerintahan tersebut dibutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan dan menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di samping itu pemerintah yang ada juga harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien. Dalam konteks ini harus ada upaya untuk selalu menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Tidak diterapkannya prinsip efisiensi dan efektivitas akan menyebabkan pemborosan keuangan dan sumber daya negara lainnya.

10. Decentralization / Al Waarits (Desentralisasi)

Desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu desentralisasi memberikan keleluasaan yang cukup besar kepada lembaga dan aparaturnya untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam usaha

menyukseskan pembangunan nasional baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Upaya pendelegasian kewenangan ataupun urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya, telah dilakukan walaupun belum dapat dilaksanakan oleh semua instansi di daerah. Namun demikian, pendelegasian kewenangan/urusan tersebut harus juga dilakukan oleh kepala daerah kepada jajaran aparaturnya di bawahnya seperti pendelegasian wewenang oleh bupati kepada sekda atau sekda kepada dinas-dinas atau badan/lembaga teknis yang ada di bawahnya.

Kesepuluh prinsip tersebut di atas hanya dapat dicapai apabila komitmen untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik tersebut telah 'masuk' ke dalam jiwa atau menjadi sistem nilai, budaya, mentalitas. Kondisi tersebut menggambarkan telah dicapainya integritas optimal dari IQ (Intellectual Quotient), EO (Emotional Quotient), dan SQ (Spiritual Quotient).

Tidak adanya keseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ yang dimiliki oleh seseorang dapat menyebabkan perilaku seseorang akan tidak sesuai dengan pendidikan atau gelar tinggi yang dimilikinya.

Kecerdasan intelektual (IQ) adalah kemampuan kognitif dan keterampilan teknis yang dimiliki seseorang. Lebih dari itu, IQ berkaitan dengan keterampilan seseorang menghadapi persoalan teknis dan intelektual.

Kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan untuk mengendalikan hal-hal negatif seperti kemarahan dan keragu-raguan atau rasa kurang percaya diri dan juga kemampuan untuk memusatkan perhatian pada hal-hal positif seperti rasa percaya diri dan keharmonisan dengan orang-orang disekeliling.

Terdapat empat unsur pokok dalam kecerdasan emosional:

1. Kemampuan seseorang memahami dan memotivasi potensi dirinya;
 2. Memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain;
 3. Senang bahkan mendorong melihat anak buah sukses, tanpa dirinya merasa terancam;
 4. Asertif, yaitu terampil menyampaikan pikiran dan perasaan dengan baik, lugas, dan jelas tanpa harus membuat orang lain tersinggung.
- Seberapa tinggi EQ seseorang mudah terlihat saat kritis, ketika suasananya tidak menguntungkan,

bahkan dalam posisi terancam. Dengan tolak ukur ini kita mendapat kesan banyak pejabat tinggi yang EQ-nya rendah meski titel akademisnya tinggi, termasuk dalam penguasaan ilmu agama, cirinya:

1. Jika bicara cenderung menyakiti dan menyalahkan pihak lain sehingga persoalan pokok tergeser oleh pertengkaran ego pribadi, yang terjadi kemudian persoalan tidak selesai, bahkan bertambah.
2. Rendahnya motivasi kinerja anak buah untuk meraih prestasi karena tidak mendapat dorongan dan apresiasi dari atasan.

Pimpinan dengan EQ tinggi akan mampu memotivasi diri, lalu beresonansi pada orang-orang disekelilingnya, terutama anak buahnya. Berdasarkan pengalaman memberikan pelatihan dilingkungan birokrasi pemerintahan maupun BUMN ditemukan indikator kuat, hanya sedikit pemimpin yang mampu memberi motivasi kerja pada anak buahnya. Banyak pemimpin menjadi sasaran caci maki anak buah sehingga potensi dan dedikasi anak buah tidak optimal untuk memajukan organisasi/lembaga.

Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kemampuan yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada dibalik kenyataan. IQ, EQ, dan SQ merupakan perangkat yang bekerja dalam satu kesatuan sistem yang saling terkait (*interconnected*) di dalam diri seseorang.

Adanya keseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ yang dimiliki oleh seseorang, maka akan sangat mendukung dalam merumuskan keputusan atau eksekusi dan menyikapi hasil pelaksanaan keputusan.

KESIMPULAN

Aparatur sebagai motor penggerak dalam menjalankan pemerintahan haruslah diberikan

pemahaman tentang prinsip-prinsip dan arah kemana bangsa ini akan di bawa. Sejak adanya transformasi tentang paradigma baru pemerintahan yang sangat marak disosialisasikan tentunya harus di dukung oleh sumber daya aparatur yang siap pakai, handal dan memegang prinsip – prinsip profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur.

Dalam rangka mempersiapkan aparatur tersebut berbagai metode dipadukan mulai dari pembinaan peraturan perundang - undangan dan tak kalah pentingnya pembekalan secara moril melalui agama sebagai media religius. Ajaran tentang agama sangatlah bisa menunjang pembentukan karakter aparatur pemerintahan sebagai aktor dalam menumbuhkan kesadaran tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal tersebut dapat dilihat dalam Asmaul Husna yang tersirat dalam Kitab Suci Al-Qur'an dimana maknanya jika disandingkan dengan paradigma pemerintahan kita sangatlah relevan. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya jika diadopsi dalam pemerintahan dapat menghadirkan kesadaran aparatur yang mempunyai keseimbangan antara Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Ary Ginanjar. 2005. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*. Jakarta: Arga.
- . 2007. *Nasihat Asmaul Husna*. Jakarta: Arga.
- Efendi, Taufiq. 2006. *Upaya Pemerintah Meningkatkan Pelayanan Publik: Kasus Standar Pelayanan Minimal*. Jurnal Demokrasi dan Ham.
- Dwiyanto, Agus. DKK. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.